



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EKMI LUKSMIAWATI YUNITA**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **888681**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.110.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m²/125 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m²/95 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 860 m²/56 m² di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m²/11 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 2.474 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1.409 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah Seluas 275 m² di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 126 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
9. Tanah Seluas 145 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/40 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
11. Tanah Seluas 275 m² di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp.



50.000.000

12. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp.

50.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/68 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

2.455.500.000

1. LAINNYA, TOYOTA TRUK BOX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

2. LAINNYA, HINO TRUK BOX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000

3. LAINNYA, TOYOTA TRUK BOX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

4. LAINNYA, HINO TRUK BOX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

250.000.000

5. LAINNYA, MITSUBISHI L 300 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

6. LAINNYA, TOYOTA TRUK BOX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.

65.000.000

7. LAINNYA, HINO TRUK BOX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

175.000.000

8. LAINNYA, TOYOTA TRUK BOX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

120.000.000

9. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

340.000.000

10. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

11. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000

12. MOTOR, YAMAHA MANUAL Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000

13. LAINNYA, HINO TRUK BOX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

165.000.000

14. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000

15. LAINNYA, TOYOTA TRUK BAK TERBUKA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

16. MOBIL, MITSUBISHI L 300 BOX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



125.000.000

17. LAINNYA, MITSUBISHI TRUK BOX Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 200.000.000

18. LAINNYA, MITSUBISHI TRUK BOX Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 300.000.000

19. LAINNYA, TOYOTA TRUK BOX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 739.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 17.600.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.322.600.000

III. HUTANG

Rp. 1.732.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.590.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.